

# PERAN SOSIAL PENDIDIKAN DALAM MOBILITAS VERTIKAL MASYARAKAT DESA (Laporan Penelitian)

Moh. Mukhlas (STAIN Ponorogo)  
Mohammad Muslih (ISID Gontor)

## Abstrak

Pendidikan ternyata tidak hanya berperan meningkatkan wawasan dan kemampuan individu, juga tidak hanya membantu masyarakat untuk dapat hidup yang lebih layak di tengah-tengah masyarakat dengan kualifikasi yang diperoleh dari dunia pendidikan. Laporan hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan ternyata dapat sebagai jalur peningkatan strata sosial, dalam arti yang sangat tradisional-antropologis. Bahkan pada taraf tertentu pendidikan dapat –diartikan- “mendobrak” tradisi yang sudah cukup mengakar kuat. Dalam masyarakat Jawa, ini dapat dilihat dari fenomena penggunaan bahasa, kata sapaan, dan kata panggilan, yang pada gilirannya berpengaruh pada pola hubungan yang terjadi di masyarakat.

**Kata Kunci:** mobilitas vertikal, sosiologis, antropologis, *speech community*

## Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berupa pemerataan pendidikan pada satu aspek dan peningkatan kekuatan ekonomi pada aspek yang lain, memberikan dampak berupa lahirnya fenomena baru, yaitu terjadinya mobilitas vertikal bagi sementara anak-anak di pedesaan. Tidak sedikit anak-anak desa, yang semula dianggap sudah cukup memadai, hanya sekedar berhasil menamatkan sekolah dasar, akhir-akhir ini tumbuh kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan beberapa di antaranya berhasil mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Dibangunnya sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di setiap desa, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas (SLTP dan SLTA) pada setiap kecamatan banyak merubah wawasan masyarakat, di antaranya cara memandang anak pada sisi masa depannya.

Pertumbuhan pendidikan formal yang sangat cepat di negara berkembang, termasuk di Indonesia disebabkan berbagai sebab: (1) terjadi suatu dilusi dalam masyarakat mengenai fungsi pendidikan formal bahwa pendidikan dengan sendirinya memberi jaminan untuk memperoleh lapangan kerja terutama di sektor pemerintahan. Para orang tua, yang mempunyai pendidikan formal yang 'minim', mendambakan suatu kepastian hidup bagi anaknya, sekaligus mengaitkan posisi dalam sektor pemerintahan yang terkait dengan kekuasaan paternalistik yang feodalistik dari masa pra kemerdekaan seperti yang pernah dialaminya. (2) Desakan pendidikan universal pada tingkat pendidikan dasar yang dimulai pada tahun 60-an dengan adanya deklarasi Karachi untuk Asia, dan deklarasi Addis Ababa untuk Afrika. Seperti yang telah dikemukakan, Indonesia telah memulai menyelenggarakan pendidikan universal ini mulai kita rasakan dampaknya sejak Repelita IV dengan mulai membengkaknya gejala "*educated unemployment*". (3) Lajunya pertumbuhan pendidikan yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja, atau keengganan untuk bekerja dari ara lulusan di luar sektor pemerintah, telah menimbulkan suatu paradoks: semakin membesarnya gejala "*educated unemployment*" semakin kuat tekanan untuk memperluas fasilitas pendidikan formal.<sup>1</sup>

Sebelumnya, pandangan masyarakat tentang pendidikan anaknya adalah, bahwa; (1) pendidikan hanyalah untuk 'kelas atas' atau kaum ningrat, (2) anak adalah bernilai ekonomis dan (3) tidak jarang dianggap sebagai beban dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini lambat laun ternyata berubah. Anak harus sekolah, dididik yang memadai, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat untuk masa depannya. Demikian persepsi mereka tentang anak dewasa ini. Dan memang pada masa pembangunan dewasa ini, pendidikan juga merupakan dinamis bagi negara-negara berkembang.

Ada tiga sebab mengapa pendidikan di negara-negara berkembang terkadang menjadi buah simalakama: *pertama*, pendidikan masih merupakan suatu komoditi yang diperebutkan untuk memperoleh hak-hak istimewa (*privilege*), untuk naik pada tangga sosial seperti halnya pada zaman kolonial. Oleh sebab itu, pendidikan bersifat untuk

---

<sup>1</sup>HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992), p.193

segolongan kecil elit masyarakat (*education for the few*). Jadi, pendidikan belum merupakan kebutuhan pokok bagi seorang warga negara yang cerdas, terutama untuk pendidikan dasar. *Kedua*, pendidikan akan mengakibatkan meningkatnya harapan rakyat. Dengan terbukanya horison pemikirannya, apalagi dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini, harapannya akan jauh menerawang ke depan. Tidak jarang kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin menganga apabila kebijakan pendidikan dan peluang yang dilahirkan oleh pembangunan ekonomi tidak berjalan serasi. *Ketiga*, pendidikan akan melahirkan pendidikan yang lebih banyak lagi sejalan dengan terbukanya horizon pemikirannya.<sup>2</sup>

Perubahan pandangan seperti itu menghasilkan fenomena baru di masyarakat. Pepatah Jawa yang mengatakan “tunggak jarak mrajak” dan “tunggak jati mati”, ternyata akhir-akhir ini tidak sulit dipahami, lantaran begitu banyak dan mudah bukti-bukti yang bisa ditemukan. Tidak sedikit anak desa dari keluarga petani yang memiliki kultur agraris berhasil menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Lantas, berbekal pendidikannya itu mereka mampu mengisi posisi-posisi penting dalam kehidupan masyarakat ini, baik di birokrasi pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, perusahaan dan sejenisnya. Atas dasar pekerjaannya itu lalu mereka memperoleh gaji yang tinggi, perumahan yang bagus, kendaraan yang bergengsi, hubungan masyarakat yang lebih luas serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung posisi mereka sehingga terkesan urbanistis.

Apa yang diraih oleh anak petani desa ini adalah benar-benar berbeda dengan apa yang dialami sebelumnya. Bukan saja tempat atau lingkungan yang berlainan, tetapi juga aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti kebiasaan-kebiasaan, norma, nilai dan sebagainya. Mereka seolah-olah memasuki dunia baru, struktur sosial yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika mereka masih tinggal di desa, pikiran, perasaan dan kesadaran mereka terbentuk oleh lingkungan desa. Setelah hidup di kota lingkungan kota dengan berbagai macam aspeknya; baik aspek ekonomi, sosial maupun budaya, kesemuanya itulah yang banyak mempengaruhi dan membentuk mereka kembali. Mungkin akan terjadi redefinisi kembali tentang dirinya. Padahal, secara kultural mereka masih harus terikat dengan kehidupan sebelumnya, yaitu masyarakat desa.

---

<sup>2</sup>*Ibid*, p.192

Anak-anak desa yang beruntung mengalami mobilitas vertikal seperti ini disadari atau tidak, dituntut untuk memiliki dua jenis kultur yang berbeda, yaitu kehidupan tradisional di desa yang agraris sekaligus kehidupan di kota yang serba modern. Tidak itu saja, kalau kebetulan mereka beruntung berhasil meraih posisi-posisi penting baru yang bersifat elit, mereka juga harus menyesuaikan diri sesuai dengan posisinya itu. Akhirnya mereka juga harus mampu melakukan peran ganda dalam kehidupan masyarakat. Pada satu sisi mereka dituntut harus mampu melakukan interaksi dengan masyarakat asal di desa, yang terdiri dari para orang tua, kerabat, kenalan lama yang sementara masih tinggal di desa dengan berbagai kulturnya yang khas, sedangkan pada sisi lain mereka juga harus belajar dan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang memiliki kultur yang khas pula, masyarakat dan kultur kota. Lebih jauh perubahan seperti itu juga membawa konsekwensi-konsekwensi sosial yang lebih luas, anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berkultur ganda ini mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Mereka harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara ganda pula, baik dengan lingkungan asal orang tua yang bersangkutan maupun dengan lingkungan sehari-hari di mana mereka hidup saat ini. Dan tentu masih banyak lagi persoalan lainnya yang mereka perlu beradaptasi dan ikuti, misalnya kaitannya dengan simbol-simbol, upacara keluarga yang harus melibatkan anggota masyarakat yang memiliki dua kultur yang berbeda dalam waktu bersamaan.

Adanya peningkatan di bidang pendidikan pada masyarakat petani/pedesaan, memberikan dampak yang cukup luas bagi mereka, termasuk memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan mobilitas vertikal. Hubungan antara pendidikan dengan mobilitas vertikal masyarakat pedesaan itu kemudian diekspresikan atau tercermin dalam fenomena-fenomena tertentu. Dalam penelitian ini fenomena yang dikaji akan dibatasi hanya pada penggunaan bahasa/sapaan.

## **B. Metodologi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas serta mengacu pada latar belakang masalah maupun rumusan masalah, penelitian ini mengambil strategi sebagai berikut: (a) Jenis penelitian

ini adalah penelitian kualitatif<sup>3</sup> dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.<sup>4</sup> (b) Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan keadaan/fenomena yang sebenarnya, selanjutnya dari fenomena itu dicoba menemukan ‘makna’ adanya hubungan antara dua hal, yaitu pendidikan dan mobilitas vertikal. (c) Metode yang digunakan adalah metode ‘*participant observation*’ sebagai metode utamanya, dimana peneliti secara langsung sebagai subyek juga termasuk sebagai obyek penelitian sekaligus. Dan metode ini akan didukung oleh metode yang lain, yaitu metode *unstructured interviewing* dan metode *dokumentasi*.<sup>5</sup> (d) Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, maka digunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif. (e) Dari hasil analisa data tersebut, selanjutnya disusun hasil penelitian, yang berupa kesimpulan. Dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologis, analisa dibedakan antara analisis data selama di lapangan dan analisis data setelah meninggalkan lapangan. Inti dari analisis data selama di lapangan adalah agar tidak terjebak ke pengumpulan ‘sampah’ tetapi berupaya membangun ide.<sup>6</sup> Ide memang perlu berlandaskan data, tetapi data bukanlah tujuan, melainkan alat untuk memperjelas fikiran dan mencari generalisasi ide. Sedangkan analisis data setelah meninggalkan lapangan adalah menyangkut dua konsep, yaitu *indeksikalitas* dan *refleksikalitas*. Indeksikalitas adalah keterkaitan makna kata, prilaku, dan lainnya pada konteksnya. Dan Refleksikalitas adalah tata-hubungan atau tata-susunan sesuatu dengan atau dalam sesuatu lain. Bila kedua tata tersebut diubah akan terjadi perubahan makna.<sup>7</sup> Dengan menggunakan analisa

---

<sup>3</sup>Menurut HM. Djunaidi Ghony, penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang dipakai dalam pendekatan fenomenologis dengan memakai metode utamanya partisipan observasi, unstructured interviewing dan personal dokument. Lihat Drs. HM Djunaidi Ghony, “Filsafat Penelitian Dalam Pengajaran sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia”, *Orasi Ilmiah pada ‘Rapat Senat Terbuka’ dan Wisuda*, FT IAIN Sunan Apel Malang, 1994), p. 12.

<sup>4</sup>Pendekatan fenomenologis adalah upaya mencari “esensi”, “makna” dan “struktur fundamental” dari pengalaman manusia. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 34-35.

<sup>5</sup>Menurut Noeng Muhadjir, dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi pada dasarnya hanya mengenal dua metode pengumpulan data, yaitu observasi partisipan dan wawancara bebas. Lihat Prof. DR. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990/II), p. 181

<sup>6</sup>*Ibid.* p. 184

<sup>7</sup>*Ibid.* p. 186

demikian diharapkan dapat mendeskripsikan “*natural reality*” dan dapat terhindar dari penafsiran para ahli dan dari produk “*artificial thinking*”.

### C. Hasil Penelitian

Masyarakat Desa Mojorejo ternyata merupakan satu di antara masyarakat yang masih memegang tradisi dan budaya Jawa. Sekalipun pada kalangan tertentu, tradisi sudah dianggap kuno, namun pada sebagian besar masyarakatnya tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuknya budaya modern. Karakteristik masyarakat Mojorejo yang demikian ini tampaknya juga telah melalui proses pentradisian (pembudayaan) yang cukup panjang. Akar-akarnya bisa ditelusuri sampai pada tradisi yang berkembang di Solo, yakni terkait nenek moyang mereka yang babat tanah.

Selanjutnya di bawah ini, akan diuraikan peran sosiologis dari pendidikan dalam dinamika dan pengembangan masyarakat, terutama dalam mobilitas vertikal masyarakat desa. Melihat peran pendidikan dalam mobilitas vertikal masyarakat desa, sudah tentu berangkat dari asumsi dasar bahwa stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar. Dalam masyarakat Jawa, lebih-lebih di era modern ini, stratifikasi sosial tidak dimaksudkan sebagai kasta sosial, namun lebih bersifat samar yang tercermin dalam berbagai budaya mereka. Misalnya dalam pola berbahasa, dalam pertemuan-pertemuan, atau dalam upacara tradisional. Naik-turunnya (atau biasanya, hanya naik) posisi seseorang dalam beberapa hal itu, menandakan adanya mobilitas vertikal dalam masyarakat.

#### 1. Bahasa dalam Budaya Masyarakat Mojorejo

Budaya selalu dikaitkan dengan manusia. Manusia dan budaya saling menunjang satu sama lain. Manusia membutuhkan budaya, tanpa budaya manusia tidak akan dinamakan manusia. Begitu pula dengan budaya, tanpa manusia sebagai pendukungnya, budaya tidak akan ada di dunia ini. Secara lebih sederhana, budaya dapat dibatasi sebagai kebiasaan yang lahir dari akal budi manusia. Dalam melahirkan budaya, akal manusia berpikir dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya. Bahasa dalam hal ini berperan penting untuk menciptakan budaya. Bahkan dalam kenyataannya budaya yang telah ada diwariskan secara turun temurun melalui bahasa oleh nenek moyang kita.

Bahkan, bahasa menjadi wadah dari budaya. Maksudnya, nama-nama dari hasil akal budi manusia itu dilambangkan dengan bahasa. Sebagai contoh, kata sapaan yang biasa dipakai untuk menyapa orang tua laki-laki dilambangkan dengan kata *Mak-é* atau *Romo* dalam bahasa Jawa. Budaya Jawa dihasilkan dari akal budi nenek moyang orang Jawa. Bahasa Jawa sangat berperan penting dalam proses penciptaan dan pewarisan budaya Jawa hingga saat ini. Bahasa Jawa itu sendiri menjadi wadah atas konsep budaya lokal etnis Jawa. Konsep-konsep dari sistem sapaan, mata pencaharian, kesenian (sastra, nyanyian, alat musik, tari-tarian, dan ukiran), bangunan adat, senjata, dan pakaian etnis Jawa, dilambangkan dengan bahasa Jawa, artinya dengan nama-nama yang khas Jawa. Contoh, konsep ‘orang tua kandung perempuan’ dilambangkan dengan kata *simbok*, dan konsep ‘bilah besi untuk berperang’ dilambangkan dengan kata *keris*. Kata-kata seperti *simbok* dan *keris* adalah kata-kata bahasa Jawa yang menjadi wadah budaya etnis Jawa.

Bahasa Jawa adalah bahasa ibu orang-orang Jawa yang tinggal, terutama di Propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Di daerah-daerah lain, misalnya, Banten sebelah utara, di Lampung dan daerah-daerah transmigrasi di beberapa pulau di Indonesia terdapat pula orang-orang Jawa yang berbahasa ibu bahasa Jawa. Bahasa Jawa sejak lama adalah bahasa pengantar suatu peradaban besar. Tradisi sastra tulis telah ada dan terus terpelihara, paling tidak sejak abad ke sepuluh.<sup>8</sup>

Seperti bahasa lain, bahasa Jawa mempunyai berbagai dialek geografi. Dialek geografi seperti dialek Banyumas, Tegal, Yogya-Solo, Surabaya, Samin, Osing dan lain-lain memiliki sub-dialeknya sendiri. Seperti masyarakat bahasa lain, dalam masyarakat Jawa orang dapat membedakan golongan orang kecil dengan golongan yang lebih tinggi hanya dengan melihat adanya ciri kebahasaan tertentu yang sering dipakai oleh golongan-golongan itu.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat bahasa (*speech community*) dapat dipastikan terdapat aturan berbahasa yang disepakati oleh para anggotanya. Dalam

---

<sup>8</sup>Soepomo Poedjosoedarmo dan Th. Koendjara, S.J, *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*, (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa, 1979)

<sup>9</sup>*Ibid.*

pandangan Clifford Greetz aturan berbahasa itu diistilahkan sebagai *Linguistic Etiquette*. Dalam bahasa Indonesia istilah itu dikenal dengan “etika berbahasa”. Dalam masyarakat bahasa Jawa, misalnya, terdapat istilah tingkat tutur (*speech levels*), yaitu sistem kode penyampai rasa kesopanan yang di dalamnya terdapat unsur kosa kata tertentu, aturan sintaksis tertentu, aturan morfologi tertentu dan juga fonologi tertentu.

Tingkat tutur dalam bahasa Jawa yang umum adalah (1) ngoko, (2) krama madya, dan (3) krama inggil. Masing-masing tingkat tutur itu memiliki kosa kata sendiri. Dengan demikian, dalam bahasa Jawa terdapat kosa kata untuk tingkat *tutur ngoko*, kosa kata untuk tingkat *tutur krama madya*, dan kosa kata untuk tingkat *tutur krama inggil*. Soepomo Pudjosoedarmo menambahkan bahwa kosa kata bahasa Jawa tidak hanya terbatas pada kosa kata *ngoko*, *madya*, dan *krama*, tetapi juga meliputi *krama inggil*, *krama andap*, dan *krama desa*. Kata-kata *ngoko* memancarkan arti tanpa sopan santun; *krama madya* memancarkan arti sopan (konotasi hormat) tetapi tingkat kesopanannya agak setengah-setengah saja; *krama inggil* dan *krama andap* memancarkan konotasi hormat yang sangat tinggi; dan *krama desa* memancarkan konotasi hormat, tetapi di samping itu, ia menunjukkan juga bahwa pemakainya kurang mengetahui bentuk krama yang benar-benar standar.<sup>10</sup>

Menurut Geertz, salah satu etiket orang Jawa adalah *andap asor*, yakni: merendahkan diri sendiri dengan sopan dan merupakan kelakuan yang benar yang harus ditunjukkan kepada setiap orang yang kira-kira sederajat atau lebih tinggi. Selalu ada semacam kegelisahan bilamana dua orang Jawa bertemu untuk pertama kalinya, karena masing-masing menentukan tingkatan pihak lainnya agar masing-masing dapat menggunakan bentuk linguistis yang tepat dan menerapkan pola *andap asor* yang tepat pula. Masing-masing penutur berusaha “bersaing” untuk menempatkan dirinya pada posisi yang paling rendah. Namun, persaingan ini sebenarnya hanya bersifat pura-pura. Yang bersangkutan berpura-pura merendahkan, namun sebenarnya ia bermaksud agar dirinya ditempatkan pada posisi yang tinggi (sesuai dengan posisi yang disandangnya). Mereka biasanya memakai tingkat *tutur krama* antara satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak memakai tingkat *tutur ngoko*. Penggunaan tingkat *tutur krama* ini dimaksudkan agar yang bersangkutan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*



dapat melakukan sikap *andap asor* dan pada saat yang bersamaan dia menghormati orang yang tua umurnya, menghargai orang yang baru saja dikenal atau belum dikenal.

Tingkat tutur *krama madya* dan *krama inggil* juga digunakan untuk menghormati orang-orang yang berkedudukan atau berstatus lebih tinggi. Kedudukan atau status ditentukan oleh banyak hal, misalnya: kekayaan, keturunan, pendidikan, pekerjaan, usia, keluarga dan kebangsaan. Untuk menyapa seseorang yang lebih rendah status sosialnya atau seseorang yang lebih muda dari dirinya sendiri atau seseorang yang telah menjadi kawan akrab, penutur dapat menggunakan tingkat tutur *ngoko*. Dalam kaitan ini, Geertz mencontohkan kalimat yang dalam bahasa Indonesia berarti “Dari mana anda?”. Bila kalimat itu dinyatakan dalam tutur *ngoko* akan berbunyi “*Kowe mau saka endi?*” dan dalam tingkat tutur *krama* “Panjenengan wau saking tindak pundi?”

Dalam hubungan kekerabatan, anak terhadap orang tuanya, cucu terhadap kakek/ neneknya, menantu terhadap mertuanya, antar besan, kemenakan terhadap paman/ bibinya, diwajibkan menggunakan bahasa Jawa dengan tingkat tutur *krama*. Sementara adik terhadap kakaknya diharapkan menggunakan bahasa Jawa dengan tingkat tutur *krama*, tetapi bukan suatu keharusan. Sedangkan, pihak-pihak yang merupakan kebalikan dari mereka yang harus ber-*krama* (kecuali antara besan) diperbolehkan menggunakan tingkat tutur *ngoko* bila berbicara dengan mereka, yakni: orang tua terhadap anak, kakak terhadap adiknya, paman/bibi terhadap kemenakannya.

Pada masyarakat Mojorejo, penggunaan bahasa Jawa tampaknya juga telah banyak mengalami pergeseran dari penggunaan yang ideal sebagaimana yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz di atas. Berdasarkan pengamatan peneliti,<sup>11</sup> beberapa pergeseran penggunaan bahasa Jawa itu terkait dengan pola dasar hubungan sosial. Bila dikatakan bahwa tingkat tutur *krama* (*madya* dan *inggil*) digunakan seseorang penutur yang lebih muda atau lebih rendah derajat sosialnya ketimbang lawan tuturnya, dalam upayanya untuk ber-*andap asor* dan menghormati lawan tuturnya, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Karena, untuk konteks sekarang banyak anak-anak tidak ber-*krama* terhadap *bapak/simbok*,

---

<sup>11</sup>Dalam menjangkau data ini, peneliti menggunakan metode *participant observation* (pengamatan terlibat).

*simbah, pak de/pak lik, mbok de/mbok lik, kakang/mbak yu*, dan tetangga-tetangga mereka yang bila dilihat dari segi umur jelas lebih tua dari mereka. Memang, sebagian dari mereka —berdasarkan pengamatan— menggunakan pola seperti itu. Namun, sejumlah yang lain menggunakan bentuk-bentuk campuran (*ngoko* dan *krama*). Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan “*Sampeyan mau saka endi?*”, sebagaimana terjadi pada masyarakat Mojorejo umumnya.

Dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, penggunaan bahasa Jawa tingkat *tutur krama* oleh anak-anak muda dan/atau orang-orang dewasa dialamatkan kepada orang-orang tertentu (misalnya: tokoh agama atau tokoh masyarakat, Lurah dan anak buahnya, Camat dan anak buahnya). Namun demikian, di sana sini masih ada selipan unsur-unsur dari bahasa Indonesia atau bahasa lain. Dalam situasi formal (khutbah, ceramah, pidato, kampanye politik dan sejenisnya), kendati pembicaraanya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, Lurah, Camat dan Juru Kampanye dan sebagainya, tingkat *tutur krama* seringkali digunakan bila audience-nya berasal dari berbagai kalangan. Namun, lagi-lagi, tuturan mereka tidak melulu dalam bahasa Jawa dengan tingkat *tutur krama* (*madya* atau *inggil*), tetapi “campur tingkat tutur” (istilah bakunya, campur kode atau *code-mixing*, sebab tingkat tutur dianggap suatu kode) dengan selipan unsur bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.

Penggunaan bahasa Jawa dengan tingkat tutur tertinggi (*krama inggil*) hampir tidak tercampur dengan selipan bahasa lain atau tingkat tutur lain sangat terlihat pada acara perkawinan. Pada pesta perkawinahan, baik dari pembawa acara (MC), tuan rumah, wakil pengarak maupun dari muballigh, bisa dipastikan menggunakan bahasa bahasa Jawa krama inggil. Namun di luar daerah, dalam acara serupa, penggunaan bahasa Jawa dengan tingkat *tutur krama inggil* sudah mulai jarang ditemukan. Kalaupun ada, tak jarang ditemukan penggunaan bahasa Jawa dengan berbagai tingkat tutur dan selipan unsur-unsur bahasa-bahasa lain.

Harus diakui, penggunaan bahasa Jawa yang memiliki sejumlah tingkat tutur itu dewasa ini telah banyak mengalami pergeseran dari penggunaannya yang ideal. Sejumlah orang bertutur dengan tingkat *ngoko* padahal semestinya dengan tingkat *tutur krama*. Celaknya lagi, sejauh penelitian ini, penguasaan tingkat *tutur krama* (*madya* dan *inggil*) pada kalangan kawula muda, kondisinya cukup memperhatikan, untuk

tidak mengatakan “jelek”. Tampaknya, mereka kurang memiliki kompetensi dalam bahasa Jawa, khususnya tingkat *tutur krama*, yang memancarkan konotasi hormat itu. Sehingga, performansi dalam bahasa itu kurang bagus.

Yang lebih memprihatinkan lagi, mungkin menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa “tradisional” dan biar dianggap sebagai orang-orang yang modern dan *educated*, ada sejumlah orang tua membiasakan anak-anak mereka menggunakan bahasa Indonesia –dengan Jawa mereka yang medok–, padahal mereka hidup di lingkungan masyarakat bahasa (*speech community*) bahasa Jawa. Mereka tampak begitu bangga ketika memperhatikan anak-anak mereka berbahasa Indonesia. Hal yang demikian, menurut Supriyadi (46),<sup>12</sup> di samping tidak mendidik anak-anak untuk mampu berbahasa Jawa, menyusahkan mereka dalam bergaul dengan sesama mereka, tetapi juga “membutakan” mereka terhadap budaya yang terpancar dari bahasa Jawa itu sendiri, seperti *adap asor*, dan *unggah-ungguh*. “Anak-anak yang hidup dan bergaul dalam masyarakat tutur bahasa Jawa, ajarilah, atau jika tidak, biarkanlah mereka berbahasa dan berbudaya Jawa”, demikian Supriyadi.<sup>13</sup>

## 2. Perihal Sapaan

Sebutan, sapaan, atau gelar di depan dan di belakang nama seseorang langsung atau tidak langsung memberikan beberapa efek pada pemiliknya. Baik dalam berpikir atau merasa. Saat disapa dengan sebutan “Mbak” atau “Yu”, secara tidak langsung seorang perempuan telah diposisikan sebagai orang yang, dari segi usia, lebih tua. Demikian juga jika seseorang menyapa orang lain dengan “Kang” dan “Mas” juga “Pak” tentu dengan anggapan orang itu lebih tua atau –seringnya- merasa lebih respek kepada mereka walaupun dari segi usia mereka sebaya bahkan ada juga yang lebih muda. Sementara menyapa dengan nama tanpa *embel-embel* apapun, bagi sebagian orang Jawa membuat relasi menjadi lebih egaliter dan akrab.

Sedangkan kata ganti “kawula” atau “dalem”, untuk menyebut “saya”, biasanya dipakai dalam situasi formal, atau dengan orang-orang yang baru dikenal atau jika ingin “berjarak” dengan rekan bicaranya.

---

<sup>12</sup>Supriyadi adalah warga Mojorejo

<sup>13</sup>Hasil wawancara pada Jum’at, 1 Mei 2009

“Aku” atau “kula” dipakai dalam situasi informal dengan orang-orang yang sudah dianggap akrab. Biasanya kata ganti “aku” ini juga digunakan jika ingin memperkecil “jarak sosial” dengan rekan bicara dan membangun situasi yang lebih intim dan akrab.

Pada masyarakat Mojorejo, kata-kata yang menunjukkan respek atau menunjukkan berjarak tersebut memang tidak selalu digunakan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tetapi juga kepada seseorang yang secara garis keturunan tergolong “ningrat”. Meski demikian terdapat juga perkembangan baru, “penggunaan bahasa *inggil* itu juga digunakan kepada kaum terdidik, meskipun bila dilihat dari garis keturunan, mereka tergolong awam (masyarakat bawah)”, demikian ungkap Purnomo (51).<sup>14</sup> “Itupun biasanya, diberikan kepada mereka yang telah sampai pada pendidikan tingkat sarjana atau di atasnya, dan biasanya lagi, pendidikannya itu dilakukan di luar kota, seperti di Jakarta atau Yogyakarta”, demikian Purnomo menambahkan.

Penamaan, kata sapaan, sebutan, kata ganti (untuk benda dan orang), keterangan tempat atau waktu serta hubungan antara kata-kata tersebut dengan konteks penggunaannya direfleksikan secara linguistik dalam istilah “*deixis*”. *Deixis* berasal dari bahasa Yunani *δείκνυμι* yang bermakna “menunjukkan”, di dalam bahasa Latin disebut “*demonstratio*”. Dalam “*deixis*” dibahas bagaimana bahasa meng-*enkodifikasi* dan menggramatikalisasi konteks ujaran atau suatu peristiwa ujaran. Dengan demikian, interpretasi terhadap suatu ujaran sangat bergantung pada analisa setiap konteks di luar ujaran. Penerapan *deixis* akan lebih “mudah” terlihat dalam *face-to-face-interaction*. Dalam bahasa tulis biasanya dapat dianalisa dengan menggunakan “pisau bedah” pragmatik, lebih khusus lagi dengan menggunakan “*speech act theory*”.

Selain *deixis* waktu (misalnya: sekarang, hari ini, besok, nanti, dll), *deixis* tempat (misalnya: di sana, di sini, di situ, dll), ada *deixis* persona (nama, kata ganti orang, panggilan dan sapaan) dan *deixis* sosial (sapaan dan sebutan). Beberapa contoh di atas bisa dimasukkan ke dalam *deixis* persona.

*Deixis* sosial disebut juga “*honorifica*” (latin “*honorificus*”: menghormati) digunakan sebagai penanda status sosial seseorang atau

---

<sup>14</sup>Warga Mojorejo yang juga seorang guru SMP Negeri di Ponorogo

suatu benda lewat bahasa. Honorifika dalam bahasa bisa dikenali lewat kata ganti orang, kata sapaan, kata penunjuk diri dan dalam beberapa bahasa lewat kata kerja. Misalnya kata sapaan “Mbak” dalam konteks sosial masyarakat berbudaya Jawa awalnya digunakan untuk menyapa saudara perempuan yang lebih tua. Namun, sapaan ini berkembang luas menjadi sapaan untuk perempuan secara umum, terutama yang tidak dikenal secara pribadi. Contoh lainnya, bahasa Jawa mengenal “undak usuk” atau tingkatan dalam berbahasa. Ada yang halus, ada yang sedang dan ada pula yang kasar. Kesemuanya menjadi sebagian indikator penanda adanya “jarak” juga “tingkatan” saat seseorang berbahasa. Itu masih belum ditambahi-tambahi dengan berbagai macam gelar yang sebenarnya dikonstruksi oleh masyarakat pengguna bahasa.

### 3. Mobilisasi Sosial dalam Bahasa dan Sapaan

Seperti telah disinggung di atas, pada masyarakat Jawa umumnya bisa ditemui berbagai golongan masyarakat yang pada praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan satu dengan golongan yang lain. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial baik itu secara ketat ataupun lebih bersifat terbuka. Masyarakat Mojorejo tampaknya termasuk masyarakat yang menganut pelapisan sosial yang bersifat terbuka, maka warga yang bersangkutan bisa dengan leluasa naik atau bahkan turun dari tingkat satu ke tingkat lainnya, sudah tentu atas dasar faktor-faktor tertentu.

Dengan demikian, setiap warga Mojorejo pada dasarnya mempunyai kesempatan untuk menaiki kelas sosial mereka dalam struktur sosial masyarakat. Inilah yang biasa disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya.<sup>15</sup> Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup.

Mobilitas sosial sebenarnya dapat berlangsung dalam dua arah, sekalipun umumnya perpindahan itu dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses itu, sebagian orang memang dapat berhasil mencapai status yang tinggi, namun beberapa orang juga mengalami kegagalan, dan selebihnya tetap tinggal pada tingkat status

---

<sup>15</sup>Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)

yang dimiliki oleh orang tua mereka, bahkan turun lebih rendah daripada itu. Mobilitas jenis ini merupakan bentuk mobilitas dalam lingkup “antar generasi”, yakni dengan memperbandingkan posisi ayah dan anak dalam masyarakat, termasuk soal status pekerjaan mereka. Selain itu, juga bisa diketahui sampai sejauh mana sang anak mengikuti jejak sang ayah dalam hal pekerjaan. Mobilitas juga bisa ditelaah dari segi gerak “intra generasi”, yakni dengan mengukur sejauh mana individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri.

Meskipun mobilitas sosial memungkinkan masyarakat untuk mengisi posisi jabatan dengan orang yang paling ahli dan memberikan kesempatan bagi orang untuk mencapai tujuan hidupnya, namun mobilitas sosialpun mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya tidak diinginkan, seperti rasa ketegangan pada pribadi yang berusaha untuk naik status, rasa ketidakpuasan akan kegagalan, sikap angkuh dan sombong atas keberhasilan, rasa khawatir akan turunnya status, dan secara sosial bisa memperlemah solidaritas kelompok sebagai akibat dari dinamika antargolongan sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat berkasta, bisa ditemui contoh-contoh ekstrim dari konsekuensi-konsekuensi mobilitas sosial seperti ini, di mana ada perbedaan antara golongan yang menduduki tingkat tertentu dalam masyarakat sangat menonjol sekali dengan garis pembatas yang jelas. Norma-norma, nilai dan gaya hidup dari masing-masing kelompok juga sangat mencolok perbedaannya. Jadi menjadi hal yang biasa manakala rasa kekhawatiran orang kasta atas timbul saat posisinya terancam untuk turun ke kasta bawah. Bahkan orang kasta tertentupun jika melakukan pelanggaran atas norma yang berlaku dengan serta merta akan dikeluarkan dari kelompoknya dan dikucilkan oleh orang-orang sekasta bahkan keluarga sendiri.

Sudah tentu, kondisi seperti ini tidak terjadi pada masyarakat Mojorejo. Karena pada umumnya tokoh masyarakat (setidaknya di tingkat desa) masih dipegang tokoh-tokoh lama, mulai tokoh adat, tokoh agama sampai perangkat desa. Sehingga munculnya masyarakat terdidik sebagai “masyarakat berkelas” baru tidak mengganggu keberadaan mereka. Pada umumnya mereka bekerja di kota atau bahkan di ibu kota, sehingga waktu pulang kampung relatif jarang.

### a. Determinasi Mobilitas Sosial

Zaman dahulu seseorang mendapat status tinggi dalam sistem stratifikasi dalam masyarakatnya hanya karena faktor keturunan. Status inipun akan berlangsung selama seumur hidup tanpa ada proses kompetisi untuk menggapai ataupun mempertahankan status tertentu. Kini, kesempatan-kesempatan untuk berkompetisi meraih status pada “kelas atas” sangat terbuka sekali. Dalam masyarakat seperti ini yang lebih dihargai pada diri seseorang adalah prestasi, kecakapan, keahlian dan faktor determinan utama. Sudah tentu individu-individu sendiri yang menjadi pemain, yang akan menentukan siapa yang berhasil mencapai kedudukan tertentu dalam masyarakat.

Beberapa hal ini, terlihat jelas pada masyarakat Mojorejo. Jika 10 tahun atau setidaknya 5 tahun yang lalu, sapaan “eyang kakung”, “eyang putri”, “bapak”, “ibu”, “mas”, “mbak” dapat dipastikan dialamatkan hanya untuk sebagian masyarakat yang secara garis keturunan tergolong “ningrat” yang umumnya memang menjadi tokoh. Sedangkan sapaan “simbah” atau “mbah-e”, “mbah anang”, “mbah edok”, “mak-e”, “simbok”, “kang”, dan “yu” merupakan kata-kata sapaan yang khas untuk kalangan rakyat jelata atau kalangan awam, yang biasanya mereka adalah kaum petani, kuli atau pedagang kecil di pasar. Demikian juga dengan kata panggilan “panjenengan” atau biasanya disingkat “njenengan” sebagai kata ganti orang kedua, adalah kata penghormatan yang hanya diberikan kepada mereka yang tergolong ningrat, sementara “kowe” atau “ko” sebagaimana “Kogawa” (kamu bawa) hanya terjadi pada kalangan rakyat jelata.

Tampaknya determinasi sosial seperti ini, kini telah mengalami perubahan. Kata sapaan dan panggilan yang menunjukkan “kelas” penghormatan tidak hanya didominasi oleh golongan masyarakat yang secara garis keturunan tergolong ningrat, namun dapat terjadi juga pada mereka yang secara garis keturunan tergolong rakyat jelata.

Ada banyak fenomena menunjukkan bahwa beberapa orang yang dulunya menyandang sapaan “kang” atau “yu”, namun setelah beberapa tahun kemudian sapaan itu berubah menjadi sapaan “mas” atau “mbak”. Bagi masyarakat berkelas seperti masyarakat Mojorejo, “perubahan sapaan demikian harus diartikan sebagai peningkatan status, karena memang perbedaan kata sapaan itu bukan tanpa maksud”, demikian

Mukhtar Arifin (35).<sup>16</sup> Dengan demikian kata-kata sapaan bukan merupakan istilah yang tanpa makna.

Secara sosiologis, dalam masyarakat memang terdapat saluran-saluran tertentu bagi mobilitas sosial, melalui saluran-saluran ini status seseorang warga bisa bergerak naik dari lapisan yang rendah ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial ini antara lain organisasi pemerintahan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi dan lembaga pendidikan. Pada masyarakat Mojorejo, “saluran mobilitas itu sangat terasa melalui jalur pendidikan dan sedikit dari jalur lembaga keagamaan”, demikian Kyai Mujiono (59).<sup>17</sup>

#### **b. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas**

Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Bahkan jenis pekerjaan kasar yang berpenghasilan baik pun sukar diperoleh, kecuali jika seseorang mampu membaca petunjuk dan mengerjakan soal hitungan yang sederhana. Pada banyak dunia usaha dan perusahaan industri, bukan hanya terdapat satu, melainkan dua tangga mobilitas. Yang pertama berakhir pada jabatan mandor, yang lainnya bermula dari kedudukan “program pengembangan eksekutif,” dan berakhir pada kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua tanpa ijazah pendidikan tinggi adalah sesuatu hal yang jarang terjadi.

Hal ini diduga bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan makin besarnya kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Ternyata ini tidak selalu benar bila pendidikan itu terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi walaupun kewajiban belajar ditingkatkan sampai SMU masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin sekali tidak akan terjadi perluasan mobilitas sosial, seperti dikemukakan di atas, ijazah SMU tidak lagi memberikan mobilitas yang lebih besar kepada seseorang. Akan tetapi pendidikan tinggi masih dapat memberikan mobilitas itu

---

<sup>16</sup>Warga Mojorejo yang menjadi Kaur Keuangan pada Jajaran Perangkat Desa Mojorejo

<sup>17</sup>Kyai Mujiono (59) warga Mojorejo yang mengaku lahir sebagai anak petani, namun karena ketekunannya mendalami agama, sampai akhirnya memiliki pesantren salaf “Darur Rahmah” dengan puluhan murid (santri)nya.



walaupun dengan bertambahnya lulusan perguruan tinggi makin berkurang jaminan ijazah untuk meningkat dalam status sosial.

Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja. Dari tiga “jenis pendidikan” yang tersedia yakni pendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, tampaknya dua dari jenis yang terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijazah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan perkembangan kemudian mereka lebih mempercayai kemampuan atau *skill* individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi sang pemegang syarat tanda lulus itu. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan-pendidikan nonformal, yang lebih bisa memberikan keterampilan praktis-pragmatis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseorang.

Dalam perspektif lain, dari sisi intelektualitas, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat dan biasanya ini lebih terfokus pada jenjang-jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat.

Beberapa hal inilah kiranya yang mendorong sebagian masyarakat Mojorejo yang tergolong petani itu untuk berusaha lebih giat. “Memang, beberapa tahun terakhir ini terlihat sekali perhatian terhadap pendidikan anak lebih dimiliki oleh para petani”, demikian Sutrisno (43).<sup>18</sup> Sudah tentu motivasi mereka tidak mesti terkait dengan peningkatan status sosial. Untuk pendidikan anak, terutama di perguruan tinggi, sebagian mereka ada yang menjual sawah dan ada sebagian yang lain “berjuang” menjadi TKI di luar negeri. “Kenyataannya memang beberapa orang yang meraih gelar sarjana (S-1), bahkan yang sampai pascasarjana (S-2 dan S-3) justru anak-anak dari orang tua yang tergolong masyarakat petani”, demikian Sutrisno menambahkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sutrisno Kepala Dusun (Kasun) Mojo, bagian dari desa Mojorejo. Di desa ini, jabatan Kasun lebih dikenal dengan sebutan “kamituwa”

<sup>19</sup>Wawancara hari ahad, 10 Mei 2009

Sementara anak-anak sebaya dari keluarga ningrat, anak perangkat desa, atau anak pegawai, umumnya mereka hanya sampai tingkat SLTA dan segera setelah itu mereka berwiraswasta, bahkan ada yang tidak tamat SMA, dan ada yang lebih parah lagi, sebagian mereka justru menjadi “gunjingan” masyarakat karena perilakunya yang tidak baik.

Jika di masa kanak-kanak dan masa remaja pergaulan antara anak petani dengan anak kalangan ningrat terkesan ada jarak, namun setelah mereka dewasa, pergaulan mereka sudah tampak seperti pada “level” yang sama.

### c. Peningkatan Taraf Hidup melalui Pendidikan

Dari uraian di atas terlihat bahwa pendidikan dapat dipergunakan sebagai jalur untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih tinggi melalui usaha mereka sendiri. Penegasan ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini tidak sukar untuk dipahami karena dengan bekal pengetahuan yang mantap dan lebih-lebih lagi secara sengaja meteri yang berhubungan dengan masalah ekonomi mendapat tekanan lebih berat, maka *out put* dari pendidikan akan dapat berusaha lebih baik dalam menghadapi segala persoalan tentang kesejahteraannya.

Sebaliknya perkembangan ekonomi juga dapat membantu proses pendidikan karena dengan meningkatnya ekonomi baik nasional maupun masyarakat sekitar tempat di gelarnya pendidikan berarti meningkat pula kekuatan untuk memikul biaya pendidikan. Masalah ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat jelas terhadap kelancaran kegiatan pendidikan dan bahkan ditekankan bahwa kurikulum juga dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari pekerjaan perdagangan dan industri. Kenyataannya memang demikian, berbagai masalah yang berhubungan dengan perburuhan, perdagangan dan industri memang harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum yang baik memang memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat.

Signifikansi antara tingkat pendidikan dengan tingkat keadaan ekonomi atau hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi seseorang oleh Clark (1944) tersebut bisa diutarakan sebagai berikut.

- 1) Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya (tamatan sekolah dasar maksimal antara empat dan lima ribu dolar setahun; tingkat sekolah menengah atas maksimal antara lima dan enam ribu dolar setahun dan tingkat perguruan tinggi maksimal antara delapan dan sembilan ribu dolar setahun)
- 2) Tamatan sekolah dasar (atau sekolah menengah pertama) akan mendapat penghasilan maksimal pada usia sekitar 25-34 tahun; tamatan sekolah menengah atas akan mendapatkan penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun dan tamatan perguruan tinggi akan mendapat hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun.
- 3) Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada usia tua mendapat hasil yang seimbang dengan hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan perguruan tinggi pada usia tua mendapat hasil yang lebih besar ketika mereka mulai bekerja.

Walau demikian tentulah dimaklumi bahwa tidak semua orang mengalami atau memiliki korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan seperti diatas, penyimpangan tentu ada sebagaimana dalam masalah sosial lainnya.

### **Kesimpulan**

Dari uraian dan diskusi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa peran sosial pendidikan tidak hanya meningkatkan wawasan dan kemampuan individu, juga tidak hanya membantu masyarakat untuk dapat hidup yang lebih layak di tengah-tengah masyarakat dengan kualifikasi yang diperoleh dari dunia pendidikan. Namun, sebagaimana terlihat pada masyarakat Mojorejo, pendidikan dapat sebagai jalur peningkatan strata sosial, dalam arti yang sangat tradisional-antropologis. Bahkan pada taraf tertentu pendidikan dapat -diartikan- “mendobrak” tradisi yang sudah cukup mengakar kuat.

Jika selama ini masyarakat memahami bahwa pekerjaan layak, kekayaan duniawi, rumah mewah, istri cantik, dst.. dapat diraih oleh siapa saja, baik individu yang tergolong “kasta” tinggi maupun yang “berkasta” rendah, namun tidak demikian halnya dengan “status’ dalam strata sosial. Hampir menjadi keyakinan masyarakat pada umumnya, soal yang terakhir ini tampaknya sudah *taken for granted*, sudah *given*

dari “sana”nya. Masyarakat Mojorejo, sebagai sedikit masyarakat di Jawa yang masih memegang tradisi, dapat membuktikan lain. Dengan pendidikan, status “atas” dapat diraih oleh individu yang dulunya berstatus “rendah”. Inilah keunikan masyarakat desa ini.

Beberapa hal ini terlihat jelas dari fenomena penggunaan bahasa pada umumnya dan penggunaan kata sapaan atau panggilan pada khususnya. Sebagaimana diketahui, penggunaan bahasa jawa “krama inggil”, “krama madya”, dan “ngoko”, demikian juga kata sapaan “kang”, “yu”, “mas”, “mbak” dan kata panggilan “panjenengan”, “kowe” pada masyarakat Jawa bukan istilah yang tanpa maksud, bukan kata yang tanpa arti. Penggunaan bahasa, sapaan dan panggilan dalam tradisi Jawa menunjukkan posisi dan status sosial yang bersangkutan. Selama ini, perubahan dari sapaan “kang” menjadi “mas” atau “yu” menjadi “mbak” atau dari panggilan “kowe” menjadi “njenengan” secara tradisional hampir mustahil terjadi. Karena jika terjadinya perubahan itu berarti terjadi perubahan status.

Sekalipun demikian, tetap perlu dicermati, pendidikan bisa jadi merupakan faktor dominan bagi terjadinya perubahan status, namun, sebagaimana pada masyarakat Mojorejo, hal itu mesti dibarengi dengan peningkatan adab dan tata krama yang baik. Jika tidak, tingginya tingkat pendidikan sulit merubah *image*, apa lagi merubah status. Demikian juga, bagus adab dan tata krama memang membuat masyarakat respek, namun belum tentu bisa merubah status jika tidak didukung oleh meningkatnya pendidikan. Inilah yang dimaksud, pendidikan menjadi faktor yang dominan.

Hal lain yang juga perlu dicatat adalah, pada masyarakat Mojorejo, menggapai pendidikan setinggi-setingginya bukan dimaksudkan untuk merubah status sosial (tentu dalam pengertian tradisional-antropologis itu), tetapi untuk merubah “nasib” dan pada taraf tertentu, bisa dikatakan, untuk dapat berkompetisi di panggung dunia. Sehingga meningkatnya status dalam stratifikasi sosial yang diperolehnya merupakan akses tidak langsung dari peran sosial pendidikan yang diraihnya.

Catatan terakhir, masyarakat Mojorejo memang layak mendapatkan ini, karena perjuangan meraih pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka, mereka bayar dengan harga yang sangat tinggi. Sebagian mereka ada yang menjual tanah sawah warisan, ada pula yang rela menjadi TKI/W ke luar negeri. Sementara anak-anak ningrat dan

tokoh masyarakat, tampaknya tetap pada posisi semula, yaitu sebagai tokoh dan anak tokoh pada level desa. Karena tidak meraih pendidikan tinggi, mereka sukar menembus batas posisi di kota..

Penelitian ini lebih merupakan upaya melihat peran sosial pendidikan dalam peningkatan status sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan dan dilaporkan di saat berlangsungnya diskusi, apakah pendidikan dapat berperan meningkatkan status sosial ataukah pendidikan justru membubarkan stratifikasi sosial dalam masyarakat? Dengan bahasa lain, apakah pendidikan bisa meningkatkan harkat manusia pada masyarakat tradisional atau justru pendidikan berperan menghapus tradisi “berkelas” itu, sehingga tak ada lagi “kelas sosial”. Sudah tentu penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjawab persoalan itu. Maka diharapkan penelitian lebih jauh untuk membuktikan problem itu.

Jika dilihat lebih jauh, pendidikan bukan satu-satunya faktor dalam peningkatan status sosial masyarakat tertentu. Kondisi “inklusifitas” masyarakat yang bersangkutan tampaknya juga merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Di samping membanjirnya budaya modern, juga jelas memiliki pengaruh terhadap perubahan tradisi dan budaya suatu masyarakat. Kajian dan penelitian lebih jauh terkait beberapa masalah ini juga menarik untuk dilakukan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Ahmadi, Abu, *Sosiologi*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 22
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977
- Asyari, Sapari Imam, *Sesuatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, 1983
- Azra, Azyumardi, *Modernisasi Pendidikan Islam dan Epistemologi Ilmu*, Makalah Seminar Internasional Tentang “Modernisasi Pendidikan Islam: Sistem, Metodologi dan Materi” Di ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo, 31 Agustus 1996
- Durkheim, Emile, *Sosiologi dan Filsafat*, terjemahan Dr.Soejono Dirdjosisworo,SH, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1989

- Fadjar, Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta, Fajar Dunia, 1999
- Ghony, Djunaidi, *Filsafat Penelitian Dalam Pengajaran sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia* (Orasi Ilmiah pada 'Rapat Senat Terbuka' dan wisuda), FT IAIN Sunan Apel Malang, 1994
- Harorld G, Shane, *Arti Pendidikan Bagi Masa Depan*, Jakarta: cv Rajawali 1984
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, *Sosiologi* Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990/II)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1990/II
- Nursahid, Fajar, "Dunia Pendidikan Kita", *Republika*, Selasa 2 Mei 2000
- Poedjosoedarmo, Soepomo dan Th. Koendjara, S.J, *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*, (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa, 1979)
- Soemargono, Soejono, *Berpikir Secara Kefilsafatan*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1988
- Suprayogo, Imam, dalam Majalah Tarbiyah Edisi Okt-Des 1994
- Suryadi, Ace dan Prof. HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Tilaar, HAR, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992)
- Tilaar, HAR, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan.*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992
- Tobroni, *Orientasi Pendidikan Islam Dalam Perubahan sosial* dalam Majalah Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Malang, Okt-Des 1994